

**STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA BABAKAN
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN
PANGANDARAN**

Rizal Nurdin¹, Aan Anwar Sihabudin², Agus Nurulsyam Suparman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rizalnurdin2019@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi karena belum optimalnya Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Babakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pelaku usaha, masih terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha, dan kurangnya Pemerintah Desa dalam mempromosikan/pemasaran dari hasil pengolah ikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan Penelitian sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari pemerintah desa kurang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, belum maksimal dalam memberikan pendidikan dan pelatihan, kurang maksimal dalam memberikan arahan dan informasi pasar. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa adalah Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemerintah desa, kurangnya tenaga ahli yang disiapkan oleh pemerintah desa, terbatasnya waktu antara pemerintah desa dan pelaku usaha. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pemerintah desa meluangkan waktunya untuk melakukan pendekatan, mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, pemerintah desa menyempatkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: *Strategi Pemberdayaan, Pemerintah Desa, dan Ekonomi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Salah satu penting dari pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang sering terjadi di masyarakat sering dikaitkan dengan beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diikuti dalam berbagai pembelajaran yang telah diadakan oleh lembaga-lembaga yang berada di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami sebagai suatu proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang sektor kehidupan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Target Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat serta berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa: “Upaya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kebijakan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebito, (2019: 30). Adalah: “Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat”.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Menurut (Gartina, dkk, 2019:294) Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan

Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah.

Menurut (Sunarti, 2015:753) yaitu belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan masih terdapatnya permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum selesai dengan yang diharapkan yaitu masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. Hambatan-hambatan yaitu kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisipasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.

Dalam Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa pelaku usaha di antaranya yaitu pengrajin kerang, pengolah ikan

asin, keripik pisang, gula merah, kerajinan dari lidi. Dalam hal ini kelompok pengolah ikan asin belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal, hal ini dikarenakan masih adanya berbagai permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengolah ikan asin seperti belum adanya peran pemerintah desa, terbatasnya penguasaan dan pemilikan akses produksi terutama permodalan dan masih rendahnya penguasaan teknologi karena sebagian masih menggunakan peralatan manual dan informasi pemasaran.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan penulis, masalah yang dihadapi di masyarakat Desa Babakan, ternyata belum optimalnya. Hal ini dibuktikan dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pelaku usaha Pengolah Ikan Asin, hal ini dikarenakan masih kurangnya kegiatan pembinaan, bimbingan dan pendampingan terhadap pelaku usaha sehingga belum mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya.
2. Masih terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha Pengolah Ikan Asin karena hanya mengandalkan modal sendiri serta sebagian pelaku usaha masih menggunakan peralatan manual ataupun tradisional. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa terkait dengan

dukungan permodalan dan fasilitas yang menunjang kegiatan usaha terhadap pelaku usaha dan kurang memberikan arahan serta informasi mengenai akses permodalan baik dari pemerintah maupun swasta.

3. Kurangnya Pemerintah Desa dalam mempromosikan/pemasaran dari hasil pengolahan ikan asin. Contohnya: Pemerintah Desa kurang dalam membantu pengolah ikan asin dalam hal pemasaran produk hasil olahan produksi ke tempat-tempat objek wisata/pusat oleh-oleh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Strategi

Menurut David (dalam Akadon, 2011:18) Strategi adalah:

Sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diverifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah

tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:30) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah: "Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat".

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2001:12) Strategi Pemberdayaan adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diterapkan. Sedangkan menurut Suyono (dalam M. Anwas 2014:89) Strategi Pemberdayaan merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:167) Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi strategi sebagai suatu rencana, strategi sebagai kegiatan, strategi sebagai suatu instrumen, strategi sebagai sistem dan strategi sebagai pola pikir.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (dalam Mardikanto dan Soebiato,

2019:171-172) mengemukakan strategi pemberdayaan 5 (lima) P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat sebuah indikator permasalahan dilatarbelakang, hal ini membuat penulis memasukan teori yang menurut Suharto (dalam Mardikanto dan soebiato).

METODE

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di dalam penelitian menggunakan metode kualitatif karena dengan mudah dapat membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan judul tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Jumlah informan sebanyak 6 orang, dengan rincian; Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kasi Kesejahteraan 1 orang, dan Pelaku Usaha 3 orang. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan lapangan dengan hal itu diberikan

kode agar sumber dataya tetap dapat ditelusuri.

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, menerima dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan dimensi pemungkinan dapat diketahui bahwa Pemerintah desa dalam memberikan dorongan motivasi untuk mengembangkan potensi masyarakat dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dilaksanakan belum berjalan dengan baik dan optimal sehingga pemerintah desa belum mampu dalam memberdayakan potensi pelaku usaha pengolah ikan dalam mengembangkan potensi dan kegiatan usahanya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa adalah Kurangnya pertemuan dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang tidak memadai sehingga dalam memberikan motivasi kesulitan didalam mengembangkan potensi dan usahanya, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sehingga jarang bertemu dengan pelaku usaha pengolah

ikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu Dengan cara pendekatan kepada pelaku usaha dan melakukan pertemuan yang lebih rutin kepada kelompok sehingga dapat mempermudah dalam memberikan dorongan motivasi, dengan cara pemerintah desa meluangkan waktunya untuk melakukan pendekatan dengan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran masyarakat didalam mengambil langkah-langkah menjalankan usahanya, seperti melakukan sosialisasi atau diskusi.

Menurut Mardikanto dan Seobiato (2019:30) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah “Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, Pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari teori di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa selama ini belum mampu memberdayakan pelaku usaha pengolah ikan dengan baik dan optimal, mengingat proses pemungkinan yang dilakukan kepada pelaku usaha pengolah ikan belum berjalan dengan baik dan optimal, karena keterbatasan waktu yang dimiliki aparat pemerintah desa dan juga rendahnya keinginan pelaku usaha

pengolah ikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Penguatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dimensi penguatan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemerintah desa dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan usaha dan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin kepada pelaku usaha. Hambatan yang dihadapi pemerintah desa adalah tidak adanya anggaran yang memadai untuk memfasilitasi para pelaku usaha pengolah ikan, kurangnya tenaga ahli yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak koperasi guna menunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha pengolah ikan, dengan mendatangkan narasumber yang ahli dibidang berupa dalam pengemasan yang baik dan menarik minat pembeli dan juga berkolaborasi dengan teknik kelautan dan juga melakukan pertemuan lebih rutin dengan pelaku usaha.

Sedangkan menurut Mas’oed dan sumodiningrat dalam (Mardiknto dan Seobiato, 2019:26) mengemukakan bahwa berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk : “Upaya untuk

Memandirikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan”

Dengan demikian, menurut teori di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa selama ini belum mampu memberdayakan pelaku usaha pengolah ikan dengan baik dan optimal, mengingat proses penguatan yang dilakukan dalam menyediakan fasilitas pendukung masih belum berjalan dengan optimal dan melalui pendidikan pelatihan kepada pelaku usaha belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan belum dilaksanakan dengan rutin karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa terbatas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Perlindungan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui dimensi perlindungan mengingat masih kurangnya peran Pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang pasar untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan melindungi pelaku usaha dengan membantu memasarkan hasil produksi pengolah ikan sehingga hasil produksi belum dapat berkembang. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu terbatasnya waktu antara Pemerintah Desa dan para pelaku usaha dalam memberikan informasi tentang pasar untuk menghindari terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, kurangnya tempat atau pasar untuk menjual hasil pengolah ikan dalam membantu memasarkan hasil pelaku usaha pengolah ikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara pemerintah desa menyempatkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada pelaku usaha dan peninjauan langsung secara rutin sesuai arahan dan informasi, dengan cara merencanakan membuat sebuah toko pusat oleh-oleh khas babakan didalam memasarkan hasil produksi pengolah ikan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:174) mengartikan bahwa: “Unsur penting lainnya adalah informasi pasar domestik maupun internasional, harga, kualitas, standar, dan sebagainya sehingga produksi rakyat sejalan dengan permintaan pasar.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dari teori tersebut, maka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini belum mampu memberdayakan masyarakat melalui informasi pasar yang diberikan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menampung hasil produksi usaha pemgolah ikan, hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga belum optimal dalam memberikan perlindungan melalui informasi dan membantu pemasaran hasil produksi usaha pengolah ikan.

4. Penyokongan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi penyokongan Pemerintah Desa kurang memberikan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya dan memberikan dukungan agar pelaku usaha tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin leah dan terpinggirkan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu Keterbatasan waktu yang di miliki oleh pemerintah desa dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan tersebut, kurangnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah desa dan kekhawatiran kepada pelaku usaha jika tidak bias mengelola dengan baik. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara memanfaatkan waktu luang untuk melaksanakan bimbingan, mengadakan sosialisasi secara rutin dalam bentuk pemberdayaan seperti penyuluhan dan pendidikan dan dengan cara bermusyawarah mengenai modal usaha yang memadai dan melakukan kolaborasi dengan pihak yang sebidang.

Menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2019:152) yang menyatakan bahwa :

Kegiatan pembimbingan dalam pelaksanaan kegiatan perlu dipahami betul hal-hal yang menyangkut; kegunaan tujuan tersebut, cara mencapai tujuan tersebut, tujuan yang ingin dicapai, keterampilan yang dapat berpengaruh bagi efektivitas

bimbingan dan pelaksanaan kegiatannya, sehingga tujuan program dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dengan demikian berdasarkan pendapat dalam teori di atas dapat dikatakan bahwa proses penyokongan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik dan optimal, mengingat proses menyokong masyarakat melalui bimbingan kepada pelaku usaha belum berjalan dengan baik dan optimal dikarenakan karena keterbatasan waktu dan anggaran yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa jadi dalam memberikan bimbingan berupa pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha belum berjalan optimal dan rutin dilaksanakan.

5. Pemeliharaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi pemeliharaan kondisi yang kondusif yaitu telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa Babakan memperbaiki fasilitas fisik seperti melakukan perbaikan akses jalan setiap dusun untuk memudahkan kegiatan pemasaran hasil produk yang dihasilkan agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu Akses jalan yang tidak memadai sehingga belum optimalnya pemerintah desa dalam memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi

kekuasaan berbagai kelompok dalam masyarakat, sulitnya dalam mencari pihak seperti agen dan pengusaha yang lebih maju untuk bekerja sama dan menjalin kemitraan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara melakukan perbaikan akses jalan yang masih memiliki kerusakan agar dapat memudahkan dalam memasarkan hasil produksinya, dengan cara melakukan pendekatan kepada pengusaha yang lebih maju untuk mengajak kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pemerintah desa.

Menurut Widjaja (2012:172) bahwa pemeliharaan diartikan sebagai berikut: “Pemeliharaan dalam proses pemberdayaan ini yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara semua orang. Dimana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang”.

Dengan demikian mengacu pada teori di atas bahwa pemerintah desa dirasa masih belum mampu memberdayakan pelaku usaha dengan cukup baik dan optimal, hal ini terlihat dari kurangnya Pemerintah Desa dalam membantu memfasilitasi pelaku usaha untuk bekerja sama dan menjalin kemitraan dengan pihak lain.

KESIMPULAN

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan pendapat Suharto (dalam Mardikanto dan Soebiato

2019:171-172) yang menjelaskan tentang 5 (lima) P yaitu :

1. Pemungkinan

Pemerintah desa dalam memberikan dorongan motivasi untuk mengembangkan potensi masyarakat dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dilaksanakan belum berjalan dengan baik dan optimal sehingga pemerintah desa belum mampu dalam memberdayakan potensi pelaku usaha pengolah ikan dalam mengembangkan potensi dan kegiatan usahanya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa adalah Kurangnya pertemuan dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang tidak memadai sehingga dalam memberikan motivasi kesulitan didalam mengembangkan potensi dan usahanya, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pemerintah Desa sehingga jarang bertemu dengan pelaku usaha pengolah ikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu Dengan cara pendekatan kepada pelaku usaha dan melakukan pertemuan yang lebih rutin kepada kelompok sehingga dapat mempermudah dalam memberikan dorongan motivasi, dengan cara pemerintah desa meluangkan waktunya untuk melakukan pendekatan dengan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran masyarakat didalam mengambil langkah-langkah menjalankan usahanya, seperti melakukan sosialisasi atau diskusi.

2. Penguatan

Masih kurangnya pemerintah desa dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan usaha dan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin kepada pelaku usaha. Hambatan yang dihadapi pemerintah desa adalah tidak adanya anggaran yang memadai untuk memfasilitasi para pelaku usaha pengolah ikan, kurangnya tenaga ahli yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak koperasi guna menunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha pengolah ikan, dengan mendatangkan narasumber yang ahli dibidang berupa dalam pengemasan yang baik dan menarik minat pembeli dan juga berkolaborasi dengan teknik kelautan dan juga melakukan pertemuan lebih rutin dengan pelaku usaha.

3. Perlindungan

Masih kurangnya peran Pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang pasar untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan melindungi pelaku usaha dengan membantu memasarkan hasil produksi pengolah ikan sehingga hasil produksi belum dapat berkembang. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu terbatasnya waktu antara Pemerintah Desa dan para

pelaku usaha dalam memberikan informasi tentang pasar untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang, kurangnya tempat atau pasar untuk menjual hasil pengolah ikan dalam membantu memasarkan hasil pelaku usaha pengolah ikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara pemerintah desa menyempatkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada pelaku usaha dan peninjauan langsung secara rutin sesuai arahan dan informasi, dengan cara merencanakan membuat sebuah toko pusat oleh-oleh khas babakan didalam memasarkan hasil produksi pengolah ikan,

4. Penyokongan

Pemerintah Desa kurang memberikan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya dan memberikan dukungan agar pelaku usaha tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin leah dan terpinggirkan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu Keterbatasan waktu yang di miliki oleh pemerintah desa dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan tersebut, kurangnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah desa dan kekhawatiran kepada pelaku usaha jika tidak bias mengelola dengan baik. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara memanfaatkan waktu luang untuk melaksanakan bimbingan, mengadakan sosialisasi secara rutin dalam bentuk pemberdayaan seperti penyuluhan dan

pendidikan dan dengan cara bermusyawarah mengenai modal usaha yang memadai dan melakukan kolaborasi dengan pihak yang sebidang.

5. Pemeliharaan

kondisi yang kondusif yaitu telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa Babakan memperbaiki fasilitas fisik seperti melakukan perbaikan akses jalan setiap dusun untuk memudahkan kegiatan pemasaran hasil produk yang dihasilkan agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu Akses jalan yang tidak memadai sehingga belum optimalnya pemerintah desa dalam memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan berbagai kelompok dalam masyarakat, sulitnya dalam mencari pihak seperti agen dan pengusaha yang lebih maju untuk bekerja sama dan menjalin kemitraan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara melakukan perbaikan akses jalan yang masih memiliki kerusakan agar dapat memudahkan dalam memasarkan hasil produksinya, dengan cara melakukan pendekatan kepada pengusaha yang lebih maju untuk mengajak kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadon. (2011). *Strategic Management for Education Management*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gartina, Nina, dkk. (2019). *Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah*. Ciamis.
- Hikmat, H. (2011). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Lexy J.Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presepektif. Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sunarti, Neti. (2015). *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Ciamis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa